

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DI PASAR AIR TIRIS
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



OLEH

MHD PADZILLAH

11327106224

UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

M. Kastulani, SH. MH
Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Oktober 2019
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Domor : Nota Dinas
amp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. MHD PADZILLAH

Assalamual'aikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti, memeriksa, memberikan petunjuk, serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama MHD PADZILLAH yang berjudul: **"JUAL BELI PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DI LIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR"**, telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat Sdr. MHD PADZILLAH tersebut dapat dipanggil dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam
Dosen Pembimbing

M. Kastulani, SH. MH
NIP. 19630909 199902 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PAKALAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI INDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI PASAR AIR IRIS KABUPATEN KAMPAR*, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Padzillah
 NIM : 11327106224
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Firdaus, SH., MH

Sekretaris
 Fari Pirmansyah, SH., M.H.

Penguji I
 Roni Kurniawan, SH., MH.

Penguji II
 Syafrinaldi, SH., MA.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bagi pemilik merek yang mereknya ditiru atau dipalsukan oleh orang lain tentunya bagi pemilik merek tersebut merasa dirugikan. Sebagaimana halnya dengan penjual pakaian dengan merek palsu (tiruan) di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Tentunya penjual yang meniru merek pakaian tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan di pihak lain tentunya mengalami kerugian, oleh karena itu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek tersebut menurut undang-undang. Merek pakaian tiruan tersebut seperti merek levis, merek lee dan merek hugo, yang mana merek-merek tersebut merupakan merek terkenal, tetapi banyak merek tersebut dipakai untuk pakaian yang tidak asli (KW), yang berdar pada berbagai pasar termasuk Pasar Air Tiris.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, dan bagaimana dampak pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten Kampar.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan jual beli pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang jual beli pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, terus berkembang dan semakin hari semakin banyak, menurut undang-undang tersebut tidak dibenarkan kecuali merek tersebut dialihkan oleh pemiliknya melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain dari hal tersebut maka penggunaan mereka milik orang lain adalah ilegal termasuk pakaian dengan merek tiruan atau palsu.

Dampak penjualan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten Kampar, antara lain adalah sewaktu-waktu pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan niaga, berupa tuntutan ganti rugi. Di samping itu juga dapat meminta ke pengadilan untuk menarik atau menghentikan peredaran barang dagangan yang menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini merupakan dampak yang bisa terjadi akibat penjualan pakaian dengan merek tiruan atau palsu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M. Kastulani, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2019

MHD PADZILLAH
NIM. 11327106224

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	11
B. Gambaran Umum Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar	15
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemalsuan.....	19
B. Pengertian Barang Palsu	20
C. Merek.....	21
D. Hak Kekayaan Intelektual.....	25
E. Hak Cipta	28
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perkembangan Pakaian Merek Tiruan (Palsu) Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Dampak Terhadap Pakaian Merek Tiruan (Palsu) Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar	41
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel I.1	Populasi dan Sampe.....	18
Tabel IV.1	Jawaban Responden Tentang Adanya Penjualan Pakaian dengan Merek Tiruan (Palsu)	35
Tabel IV.2	Jawaban Responden Tentang Penjual Memberitahukan kepada Pembeli bahwa Pakaian yang Dijual adalah Merek Tiruan (KW)	37
Tabel IV.3	Jawaban Responden Tentang Adanya Kesepakatan dalam Jual-Beli.....	39
Tabel IV.4	Jawaban Responden Tentang Adanya Pengaduan dari Pemilik Merek	40
Tabel IV.5	Jawaban Responden Tentang Pemakaian Merek tidak Mendapat Izin dari Pemiliknya	43
Tabel IV.6	Jawaban Responden Tentang Pemilik Merek Dapat Mengajukan Tuntutan.....	45
Tabel IV.7	Jawaban Responden Tentang Adanya Tuntutan dari Pemilik Merek.....	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapat sesuatu yang diinginkan, baik dari segi sandang, pangan maupun papan (perumahan), demikian juga halnya dengan kebutuhan akan pakaian dengan berbagai jenis dan merek dapat ditemui di pasar, supermarket, mall dan sebagainya.

Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen tersebut dipasarkan melalui tempat-tempat yang sudah ditentukan, yakni di pasar. Saat ini perkembangan barang-barang khususnya pakaian dalam berbagai merek beredar dan berkembang di pasaran. Demikian juga halnya dengan pakaian dengan merek tiruan (palsu). Sebagaimana halnya dengan pakaian di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, yang banyak beredar barang-barang dengan merek tiruan atau palsu, sehingga dapat merugikan pembeli atau konsumen, dan juga sekaligus melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, merek adalah tanda atau gambar, huruf, angka dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek tersebut apabila sudah terdaftar, maka orang lain dapat menggunakan merek tersebut atas izin dari yang memiliki merek tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa, “Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.¹

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, bagi seseorang yang ingin memakai merek suatu produk, maka yang bersangkutan harus mendapat izin terlebih dahulu kepada pemilik merek yang bersangkutan, karena merek yang sudah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Pasar Air Tiris bahwa ada penjual pakaian yang menjual pakai dengan merek tiruan atau palsu. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Merek tiruan tersebut adalah merek orang lain yang digunakan untuk suatu pakaian yang sebenarnya tidak sebagai produk dengan merek yang sebenarnya.

¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.² Dari pernyataan tersebut jelas bahwa bagi pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang sudah terkenal, bagi yang ingin menggunakannya maka harus melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.³ Oleh karena itu hak merek perlu mendapat perlindungan hukum, agar pemilik merek tersebut tidak dirugikan oleh pihak-pihak lain yang meniru merek yang sama.

Sebagaimana halnya pakaian dengan merek tiruan yang beredar di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu persoalan merek juga menjadi persoalan yang sering mendapat masalah di lapangan, karena ada saja pihak-pihak yang menggunakan merek orang lain atau tiruan yang menyerupai merek yang sudah terkenal, demi untuk mendapatkan keuntungan, hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang merek.

Bagi pemilik merek yang mereknya ditiru atau dipalsukan oleh orang lain tentunya bagi pemilik merek tersebut merasa dirugikan. Sebagaimana halnya pakaian dengan merek palsu (tiruan) yang beredar di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Tentunya ada pihak-pihak tertentu yang meniru merek pakaian tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan di

²Ibid.

³Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak lain tentunya mengalami kerugian, oleh karena itu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek tersebut menurut undang-undang.

Merek pakaian tiruan tersebut seperti merek levis, merek lee dan merek hugo, yang mana merek-merek tersebut merupakan merek terkenal, tetapi banyak merek tersebut dipakai untuk pakaian yang tidak asli (KW), yang beredar pada berbagai pasar termasuk Pasar Air Tiris.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa, merek dagang yang sudah terdaftar dilindungi oleh undang-undang, dan dalam Pasal 100 dinyatakan pula bahwa, barangsiapa yang menggunakan merek dagang orang lain tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar 2 (dua) milyar rupiah.

Peredaran pakaian yang bermerek tiruan atau bermerek palsu, merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan karena sudah menggunakan hak orang lain, jelasnya dia tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh penjual tersebut. oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan mengambil judul skripsi yakni: **“PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR”**.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan pakaian merek tiruan (palsu), dampak dari penggunaan merek orang lain tanpa izin, pelanggaran yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan merek tiruan (palsu).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana dampak pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan mendapat gambaran tentang perkembangan pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar
- b) Untuk mengetahui dampak terhadap pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang hendak penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum bisnis terutama yang berhubungan dengan merek.
- b) Untuk dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pembaca, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan keperluan akademik lainnya.
- c) Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁴

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilihat dari

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.74

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada beredar pakaian merek tiruan atau merek orang lain, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dapat merugikan pemilik merek, yang dapat dipersalahkan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual pakaian tiruan (palsu) di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pakaian merek tiruan di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,⁵ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pakaian merek tiruan di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berwujud laporan dan sebagainya,⁶ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁷

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual pakaian di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar sebanyak 32 orang, Pengawas dari Satpol PP sebanyak 5 orang, dan Bagian HAKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 orang.

Oleh karena populasi tergolong kecil, maka penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel dengan metode total sampling.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Penjual pakaian	32	32	100%	Total Sampling
2	Satpol PP	5	5	100%	Total Sampling
3	Bagian HAKI pada Kanwil Hukum dan HAM	1	1	100%	
	JUMLAH	38	38	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2019

⁶Ibid, h.30

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

⁸Ibid, h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Satpol PP di Pasar Air Tiris.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk penjual pakaian di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris

⁹Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

¹⁰Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, yang berisi gambaran umum tentang Kabupaten Kampar, dan gambaran Umum tentang Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi pengertian merek, dan jenis-jenis merek, dan perlindungan terhadap merek

BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni mengenai pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, dan dampak pakaian merek tiruan dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk sejak Tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati, sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 13 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.¹²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993 Jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, yang dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Dari 250 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar pada Tahun 2014 sebanyak 178 desa (71,2 persen) merupakan desa non tertinggal, 55 desa (22 persen)

¹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar dalam Angka Tahun 2015*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan desa tertinggal, dan 17 desa (6,8 persen) merupakan desa sangat tertinggal. Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2014 sebanyak 10.307 orang. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai Golongan III paling banyak, yaitu 5.105 orang, disusul Golongan IV sebanyak 3.382 orang, Golongan II sebanyak 1.720 orang, sedangkan sisanya 100 orang adalah pegawai Golongan I.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk akhir Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 773.171 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 397.107 jiwa (51,56 persen) dan wanita sebanyak 376.064 jiwa (48,44 persen). Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 106, yaitu berarti jumlah penduduk laki-laki 6% lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.¹³

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar, yaitu 363 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Bangkinang Kota dan Rumbio Jaya 219 jiwa/Km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/Km² dan Kampar Kiri Hilir 15 jiwa/Km².

Empat kecamatan yang luas wilayahnya di atas 1.000 Km², yaitu Kampar Kiri Hulu, Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir, tetapi memiliki kepadatan penduduk di bawah rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar (116 jiwa/Km²).

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di semua wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, sudah memiliki semua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan di Kabupaten Kampar sudah mempunyai beberap buah perguruan tinggi.

Demikian juga halnya dengan pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah antara lain penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis (dokter, perawat, bidan) dan lain-lain. Pada Tahun 2014 terdapat 1 buah rumah sakit pemerintah, 27 puskesmas, 164 puskesmas pembantu, dan 29 puskesmas keliling.¹⁴

Dibidang keagamaan, sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam (620.459 orang), diikuti oleh Katolik (61.613 orang), Protestan (5.096 orang), Budha (575 orang) dan Hindu (54 orang).

Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan serta

¹⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghidupan sosial yang bahagia baik segi material maupun spritual. Sedangkan mengenai lingkungan, pada tahun 2014 jumlah perusahaan yang telah memiliki dokumen AMDAL/UKL/UPL di Kabupaten Kampar sebanyak 72 perusahaan.

Program pembangunan industri di Kabupaten Kampar meliputi program pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain adalah program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyuluhan, serta program penelitian dan pengembangan.

Sektor perdagangan di Kabupaten Kampar dilihat dari golongan perusahaan dan jumlah perusahaan perdagangan yang sudah memiliki SIUP. Sedangkan sektor penanaman modal, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).¹⁵

Pembangunan jalan di Kabupaten Kampar setiap tahunnya meningkat, guna memperlancar arus barang dan jasa serta membuka keterisolasian suatu daerah. Pembangunan prasarana jalan diharapkan secara langsung memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Kampar pada Tahun 2014 berjumlah 2.073,10 Km² meningkat sebesar 44,75 Km dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa begitu penting sarana dan prasarana bagi kehidupan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khusus untuk pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji di Kabupaten Kampar dilakukan oleh Bagian Kesra, mulai dari pengadaan sarana prasarana, transportasi, akomodasi dan katering (makanan jemaah), bekerja sama dengan Departemen Agama Kabupaten Kampar. Bagian Kesra pada Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri dari Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Sosial, dan Bagian Keagamaan dan Bina Mental. Bagian Keagamaan merupakan bagian yang mengurus pemberangkatan jemaah haji pada setiap tahunnya.

A. Gambaran Umum Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar

Pada Tahun 1950 perkembangan wilayah Air Tiris meningkat cukup signifikan, karena Pasar Usang jauh dari jalan yang dibangun pada waktu itu. Hal inilah yang menyebabkan Pasar Air Tiris dipindahkan ke tepi jalan. Setelah pasar yang tadinya bernama Pasar Usang diganti namanya menjadi Pasar Baru Air Tiris.¹⁶

Pasar Air Tiris berada di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 dengan luas wilayah atau luas pasar lebih kurang 3 Ha, setelah dilakukan perluasan pasar. Secara geografis Pasar Air Tiris mempunyai batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Tiris.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ranah Baru yang dipisahkan oleh anak Sungai Katoman.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar.

¹⁶UPTD Pasar Air Tiris, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ranah Baru yang juga dipisahkan oleh anak Sungai Katoman.¹⁷

Pedagang di Pasar Air Tiris berjumlah lebih kurang 1.612 orang yang mana jenis dagangan pada umumnya ialah barang harian. Di Pasar Air Tiris jumlah kios Pemerintah Daerah terdiri dari 68 petak, Ruko Swadaya sebanyak 53 petak, dan ditambah 13 unit Los Pemerintah Daerah.

Pasar Air Tiris memiliki sebuah unit pelaksana teknis daerah (UPTD), yang mana UPTD ini khusus mempunyai fungsi mengelola pasar Air Tiris bersama pengurus pasar. Adapun susunan pengurus UPTD Pasar tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Nurdin, S.Sos	Kepala UPTD
2	Ibnu Abas	Sekretaris UPTD
3	Yuli Anas	Staf UPTD
4	Sinta	Staf UPTD
5	Pawit Sukadi	Juru Pungut
6	Syahroni	Juru Pungut

UPTD berfungsi khusus menertibkan, dan mengelola Pasar Air Tiris ke arah yang lebih baik, agar Pasar Tradisional memiliki kenyamanan baik bagi pembeli, terkhusus bagi pedagang. Di samping memiliki UPTD, Pasar Air Tiris juga memiliki pengurus yang berperan sebagai pengelola perpanjangan tangan dari UPTD Pasar Air Tiris.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terhadap pelaksanaan tugas kedinasan, dimana dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan cepat,

¹⁷UPTD Pasar Air Tiris, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat, dan efisien. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada UPTD Pasar Air Tiris, sebagai berikut.

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan UPTD	1	Baik
2	Kios Pemda	68	Baik
3	Los Pemda	13	Baik
4	Ruko Swadaya	53	Baik
5	Bangunan WC	3	Baik

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa, sarana dan prasarana yang ada di UPTD Pasar Air Tiris, dari tabel jumlah Kios Pemda merupakan jumlah yang mendominasi di dalam pasar tersebut, dengan alasan pasar tersebut merupakan pasar yang memberi kenyamanan baik bagi pembeli, maupun bagi pedagang. Sedangkan yang masih dirasa kurang adalah bangunan MCK/WC, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan ke depan perlu ada penambahan WC yang layak, dan dapat memberikan pelayanan yang nyaman bagi pengunjung pasar.

Pemerintah Kabupaten Kampar secara bertahap memang mengalokasikan dana untuk pembangunan pasar Air Tiris, karena posisi dan letak dari pasar Air Tiris tersebut adalah di pinggi jalan lintas Bangkinang-Pekanbaru, yang setiap hari ramai dilewati oleh berbagai kendaraan, dan juga diharapkan banyak yang akan berbelanja di Pasar Air Tiris.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa mengembangkan pasar tersebut sebagai pasar persinggahan karena berada di pinggir jalan lintas. Sehingga perkembangan dari pasar Air Tiris diharapkan

mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan masyarakat
kampung pada umumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar, yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.¹⁸

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tiap semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang, seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak

¹⁸H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, (Bandung: Alumni, Bandung, 1986), h.155

dimilikinya. Gambaran ini bahwa orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar atau asli.

Palsu juga diartikan sebagai tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, dan sebagainya. Palsu juga diartikan sebagai tiruan atau memalsukan suatu barang atau gambar atau ciptaan seseorang, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

B. Pengertian Barang Palsu

Barang palsu adalah versi tiruan atau replika dari produk milik perusahaan lain. Produksi, promosi, atau penjualan barang palsu merupakan jenis pelanggaran merek dagang yang ilegal di kebanyakan negara, dan dianggap merugikan bagi pelanggan, pemilik merek dagang, dan penjual produk asli.

Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda, tulisan/surat yang menjamin keasliannya/kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan, serta peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan/kesempatan terjadinya perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga terhadap merek, tanda dan suratnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.¹⁹

Demikian juga halnya dengan pembangunan di bidang industri, penggunaan bahan baku tertentu yang tergolong langka karena penggunaan yang terus meningkat. Kelangkaan tersebut dapat menimbulkan kesempatan yang lebih banyak untuk terjadinya perbuatan-perbuatan atas bahan-bahan baku tersebut,

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbuatan mana akan lebih banyak memberikan keuntungan. Pengaturan dan penertiban dalam lalu lintas barang pada saat ini menambah jumlah tulisan/surat, tanda dan sebagainya untuk dapat dipalsukan.

C. Merek

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda.
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Di samping merek dagang, terdapat juga merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Perundang-undangan tentang merek memperkenalkan adanya hak prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dengan organisasi internasional perlindungan merek, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beriktikad baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Permohonan pendaftara merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau kuasanya kepada kementerian yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas sebagaimana disebutkan di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota perlindungan merek Internasional.²⁰

Sedangkan Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan, tetapi pertama sekali direkayasa oleh praktek dan yurisprudensi. Salah satu Keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3051 K/Sip/1981, tanggal 28 Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond. Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi merek. Alasan non-use dari pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi, sekarang ketentuan tentang lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Merek

²⁰Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada departemen yang berwenang dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.²¹

Terhadap penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai habis masa berlakunya lisensi tersebut.

Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Jika pembayaran royalty telah dilaksanakan sekaligus, maka pemilik merek yang telah dibatalkan wajib mengembalikan royalty kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan dengan jumlah yang sebanding dengan sisa jangka waktunya.²²

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pemilik merek merupakan pemegang lisensi merek yang dilindungi oleh undang-undang, bagi pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut harus membayar royalty kepada pemilik merek yang bersangkutan. Apabila pemakain merek orang lain tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut, menggunakan merek orang lain tanpa izin, bahkan apabila dipalsukan merek yang bersangkutan dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi dan yang meniru merek tersebut tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut.

²¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.337

²² *Ibid*, h.338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hak Kekayaan Intelektual

Hak merek telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta merek. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak merek adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.²³

Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, pengertian hak merek dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Pengertian hak merek sebagai hak eksklusif di dalam Undang-Undang Tentang Merek, dirasakan perlu penjelasan lebih jauh, karena walaupun hak merek bersifat eksklusif, pemegang hak merek tidak mudah mempertahankannya. Sementara pengertian hak merek menurut Undang-Undang Tentang Merek, adalah hak eksklusif merek yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu merek diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²⁵

²³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011), h. 74-75.

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak merek sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta merek mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak merek secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu merek oleh pencipta merek tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan merek oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta merek, sebaliknya pemanfaatan merek tanpa batas waktu oleh pencipta merek juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak merek dengan yang menolak hak merek adalah bahwa hak merek memiliki masa berlaku yang terbatas (*copyright is limited in time*). Hak-hak yang tercakup di dalam hak merek, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak merek adalah hak untuk: 1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik); 2. mengimpor dan mengekspor merek ciptaan; 3. menciptakan karya turunan merek atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan 5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.²⁶

Hak merek berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah merek tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Tentang Merek, pemberlakuan

²⁶ "Hak Cipta", <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 11 November 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka waktu perlindungan hak merek ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.²⁷ Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta merek sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.

Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak merek belum sepenuhnya dijamin di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Maksudnya di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak merek merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak merek adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu merek adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak merek tanpa adanya laporan dari pemegang hak.²⁸

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.²⁹ Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Tentang Hak Cipta, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.³⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak merek secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

E. Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah resmi digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang no 19 tahun 2002. Dengan telah diundangkannya UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat para pelaku bisnis dan seni di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) Desain Industri. Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) setuju Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta Baru) akan mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Indonesia sebagai penganut *Civil Law System*, maka Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta dimaksudkan untuk merangsang kreativitas dari pencipta agar selalu menciptakan suatu karya yang bermanfaat dan dapat dikomersilkan. Selama karya cipta ini belum dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengguna maka karya tersebut belum dapat menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi. Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar, menurut undang-undang tersebut tidak dibenarkan kecuali merek tersebut dialihkan oleh pemiliknya melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain dari hal tersebut maka penggunaan mereka milik orang lain adalah ilegal termasuk pakaian dengan merek tiruan atau palsu.
2. Dampak penjualan pakaian merek tiruan (palsu) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek di Pasar Air Tiris kabupaten Kampar, antara lain adalah sewaktu-waktu pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan niaga, berupa tuntutan ganti rugi. Di samping itu juga dapat meminta ke pengadilan untuk menarik atau menghentikan peredaran barang dagangan yang menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini merupakan dampak yang bisa terjadi akibat penjualan pakaian dengan merek tiruan atau palsu.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pedagang pakaian di Pasar Air Tiris harus benar-benar memperhatikan merek dagangannya, jangan sampai karena menggunakan merek palsu kemudian dituntut oleh pemilik merek yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pedagang yang bersangkutan. Oleh karena itu bagi para pedagang sewaktu membeli barang dagangan tersebut pada grosir harus memperhatikan betul merek yang digunakan pada barang yang akan dijual tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.
2. Kepada pembeli harus berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli jangan sampai membeli barang yang kualitasnya tidak bagus, tetapi dibeli dengan harga mahal. Oleh karena itu pembeli harus benar-benar memperhatikan kualitas barang dan merek yang digunakan, karena saat ini banyak barang-barang di pasaran merupakan barang tiruan atau palsu, sehingga apabila dipakai atau digunakan tidak memuaskan pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006
- Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/20359
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTSP/000/2325/2019 Tanggal 18 Maret 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : MHD PADZILLAH
2. NIM/ KTP : 11327106224
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : JUAL BELI PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR*, yang ditulis oleh:

Nama : **Mhd Padzillah**
NIM : 11327106224
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2020

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Peri Pirmansyah, SH., M.H.

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH.

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA.

Kepala Subbagian Akademik
Kemahasiswaan Dan Alumni
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MHD PADZILLAH

NIM : 11327106224

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : **PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR**

Pembimbing : M. Kastulani, SH.MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/318

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON RISET/20359 tanggal 20 Maret 2019, dengan ini Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MHD PADZILLAH**
2. NIM : **11327106224**
3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **JUAL BELI PAKAIAN MEREK TIRUAN (PALSU) DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DI PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi : **PASAR AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

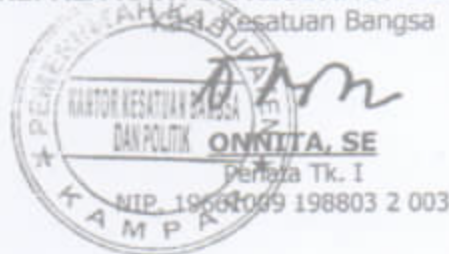
Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih,

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 22 April 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan Toko _____
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Mhd Padzillah Lahir di Kmpar pada Tanggal 14 Januari 1995, Mhd Padzillah lahir dari pasangan suami istri ayahanda Mansur Muidi dan Ibunda Nurazizah. Mhd Padzillah merupakan anak Pertama dari 5 bersaudara.

Mhd Padzillah berasal dari Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Padzillah pernah sekolah di SDN 009 desa Sawah dan selesai pada tahun 2007,

kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Kampar Kab Kampar dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan sekolah SMA Negeri 1 Kampar Kab Kampar dan selesai pada tahun 2013. Selesai dari SMA, Mhd Padzillah melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum, Kosentrasi Hukum Bisnis, dan selesai pada tahun 2020 menyelesaikan Strata satu (S1) dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.H).